

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BASIS AKRUAL
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI

**Oleh:
HERIANI
NIM 105730490314**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BASIS AKRUAL
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

OLEH

HERIANI

105730490314

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Menyelesaikan Studi
pada Program Studi Stara 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya sehingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi saya pada orang-orang tersayang.

Kedua orang tua saya, bapak Nurdin dan Ibunda Hartati Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.

Terimakasih kepada saudari dan sahabat saya yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa , susah senang dirasakan bersama dan sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.

MOTTO HIDUP

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada ALLAH hendaknya kamu berharap”.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Implementasi Sistem Akuntansi Basis Akrual pada Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng**

Nama Mahasiswa : **HERIANI**

NIM : 10573 04903 14

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 24 Agustus 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iqham Khalid, S.E., M.M.

NIDN: 0931126103

Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.

NIDN: 0915058801

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.

NBM: 107 3428





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

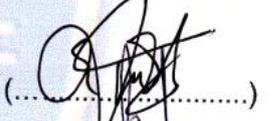
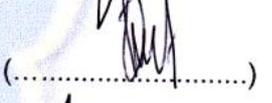
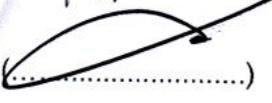
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **HERIANI**, NIM: **10573 04903 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 130/Tahun 1440 H/2019 M, tanggal 23 Dzulhijjah 1440 H/24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, $\frac{23 \text{ Dzulhijjah } 1440 \text{ H}}{24 \text{ Agustus } 2019 \text{ M}}$

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, S.E., M.M. Ak. CA. CPA. 
2. Dr. Muchriana Muchran, S.E., M.Si. Ak. CA. 
3. Mukminati Ridwan, S.E., M.Si. 
4. Ismail Rasulong, S.E., M.M. 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERIANI

Stambuk : 10573 04903 14

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Implementasi Sistem Akuntansi Basis Akrual pada
Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Soppeng

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



Heriani

Diketahui Oleh :



Ismail Rasulong, S.E., M.M.

NBM : 303078

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.CSP.
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Sistem Akuntansi Basis Akrual Pada Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng". Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Nurdin dan ibu Hartati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih dan saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini, dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Serta tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Idham Khalid, SE., MM selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, memberikan masukan yang tak bosan-bosannya, membina yang tak henti-hentinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tanpa adanya kendala, begitu pula Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP., selaku pembimbing II yang telah berkenaan membantu dalam penyusunan skripsi, membenarkan kesalahan penulis,

memberikan masukan dan motivasi yang dapat menjadikan skripsi ini selesai tanpa adanya kendala.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.,CA.,CSP. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Para staf karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Seluruh staff kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Rekan-rekan seperjuangan Githa,Ririn,Ali,Ical,Dedy,Andry,Koe yang telah banyak bantuannya dan memberi dorongan dalam aktivitas studi penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq fastabiqul kahirat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2019

Heriani

ABSTRAK

HERIANI, Tahun 2019 Implementasi Sistem Akuntansi Basis AkruaI Pada pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Idham Khalid dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diolah adalah dokumen-dokumen serta asrip-arsip dalam instansi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian pada BPKD adalah penerapan akuntansi berbasis akrual diterapkan pada tahun 2015 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi yang diterapkan di Kab.Soppeng mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/PERBUP/XI/2014 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dan dampak yang dihasilkan dari penerapan akuntansi akrual secara penuh yaitu transaksi lebih transparan dan realtime.

Kata Kunci : Implementasi Sistem Akuntansi Basis AkruaI.

ABSTRAC

HERIANI, 2019 Implementation of the Accrual Accounting System in Public Sector Financial Management in the Regional Government of Soppeng Regency. Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Idham Khalid and Supervisor II Ismail Badollahi.

This study aims to determine how the application of the accrual accounting system in the Regional Government of Soppeng Regency. This type of research used in this study is a type of qualitative research with a descriptive approach. The data obtained are documents and archives in the agency. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of research on BPKD is the application of accrual-based accounting applied in 2015 in accordance with Permendagri Number 64 of 2013 concerning the Application of Accrual Based Accounting to Regional Governments and Accounting Systems applied in Soppeng Regency referring to Soppeng District Regulation Number 36 / PERBUP / XI / 2014 concerning the Government Accounting System of Soppeng Regency. And the impact resulting from the application of full accrual accounting is that transactions are more transparent and realtime.

Keywords: Implementation of the Accrual Accounting System.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumus Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	5
1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	5
2. Basis Akuntansi	7
3. Basis Akrual	7

4. Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Basis AkruaI	9
5. Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis AkruaI	14
6. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah basis AkruaI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
7. Pokok-pokok Penerapan SAP Berbasis AkruaI	21
8. Pengaruh Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan SAP berbasis AkruaI	24
9. Pengelolaan keuangan Sektor Publik	25
B. Tinjauan Empiris	27
C. Kerangka Konsep	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	34
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	34
D. Sumber Data.....	34
E. Pengmpulan Data	37
F. Instrument Penelitian	35
G. Teknik Analisis	35
IV. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	38
C. Visi dan Misi	47
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.....	49

B. Sistem Akuntansi AkruaI pada pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	51
C. Laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	54
D. Implementasi Akuntansi Basis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	58
E. Pembahasan	63
VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran	56
Tabel 5.2 Laporan Operasional	57
Tabel 5.3 Laporan Arus Kas	58
Tabel 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	59
Tabel 5.5 Neraca	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	35
Gambar 5.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penelitian69
2. Hasil Wawancara70
3. Laporan keuangan BPKD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2017..73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasa warsa terakhir seiring dengan tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai penyesuaian penatausahaan dilakukan demi mendukung perubahan tersebut. Salah satu kunci dalam perubahan tersebut adalah dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dengan terbitnya SAP ini semakin mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan yang juga menandai dimulainya babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Terbitnya PP 71 tahun 2010 mengawali periode akrual dalam akuntansi di Indonesia. Perubahan basis akuntansi ini sudah diisyaratkan oleh UU Nomor 17 tahun 2003 pada pasal 36 yaitu ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Hal yang serupa juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 70 ayat (2) yang menegaskan kembali tentang kapan pelaksanaan akrual, dan penerapannya paling lambat Tahun Anggaran 2008. Meskipun penerapan SAP berbasis akrual sudah diatur sejak 2010, namun penerapan SAP berbasis kas menuju akrual masih dimungkinkan sampai tahun Anggaran 2014.

Penerapan SAP berbasis akrual perlu kerja keras pemerintah daerah karena jumlah laporan yang harus disajikan bertambah banyak. SAP berbasis akrual menyaratkan bahwa laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh laporan dari basis kas menuju akrual yang hanya empat laporan. Untuk menghasilkan laporan-laporan tersebut diperlukan perubahan sistem akuntansi yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual, selain itu perlu *restatement* saldo-saldo akun neraca untuk mengawali pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, perubahan basis akuntansi ini dapat memengaruhi kualitas pertanggungjawaban APBD.

Banyaknya kekurangan dari *single step* berbasis kas tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Maka sistem yang lama dikembangkan menjadi sistem baru yang dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah

berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Keuangan (*financial reports*) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Karakter dalam sistem yang baru adalah *double entry* dan basis akrual (*accrual basis*). Sistem tersebut dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tidak hanya dari transaksi masa lalu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban kas yang timbul di masa depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kab.Soppeng dengan alasan yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi akrual basis pada pengelolaan keuangan sektor public.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BASIS AKRUAL PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, model yang menjadi rumusan masalah adalah:

“Bagaimana implementasi sistem akuntansi akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng ”.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem akuntansi akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dan sebagai sarana dalam menambah wawasan mengenai Implementasi Sistem Akuntansi Basis Akrual pada Pengelolaan Keuangan Sektor Pablik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya atau menambah wawasan pembaca mengenai Implementasi Sistem Akuntansi Basis Akrual pada Pengelolaan Keuangan Sektor Pablik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menerapkan SAP.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Seperti dalam organisasi profit, para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasi yang dijalankan. Selain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini memadai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi, dimana dapat memberi informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk

membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Pada umumnya terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual. Kedua basis ini membedakan cara pencatatan transaksi ekonomi dan kejadian-kejadian lain.

3. Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Akrual basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu :

a. Pengakuan pendapatan

Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam basis akrual mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

b. Pengakuan beban.

Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar.

Disamping itu, pencatatan akuntansi dengan metode akrual basis juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yaitu sebagai berikut:

1) Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Akrual Basis

- a) Menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena memenuhi azas-azas semakin baik informasi, maka semakin baik keputusan.
- b) Pangelokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat.
- c) Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah.
- d) Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas yang lebih baik.
- e) Pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik

2) Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Akrual Basis.

- a) Relative lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai.
- b) Meminimalisasi risiko kesalahan dalam pembayaran.

c) Lebih efektif pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif.

d) Lebih efektifnya audit karena akuntansi akrual menyediakan catatan yang jelas dan koheren.

4. Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Basis Akrual

a. Peluang dalam Penerapan Basis Akrual

Perkembangan opini yang diperoleh dari tahun ke tahun mulai dari diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 telah menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun 2003 sampai 2011. Perkembangan inilah yang merupakan peluang dari pemerintah untuk menerapkan basis akrual pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kelebihan dari penggunaan basis akrual akan menciptakan peluang yang harusnya dapat dilihat dari akan diterapkannya basis akrual pada pemerintahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Penggunaan dari laporan keuangan pemerintah ada para pihak yang berkepentingan secara umum terhadap realisasi anggaran.

Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah :

a) Badan legislative baik DPR maupun DPRD serta badan-badan pemerintah lainnya dalam rangka menilai pemerintah dalam pengelolaan sumber daya, dan bentuk konsistensi atas perundang-undangan.

b) Masyarakat yang memberikan pendapatan dan sumber daya yang diperlukan untuk operasional pemerintahan. Yang menerima pelayanan dari pemerintah dan siapa pemilik manfaat dari uang public dan pproperty tersebut.

2. Para investor pada sekuritas pemerintah

Investor dan kreditor tersebut menyediakan sumber daya keuangan bagi pemerintah. Pemerintah memiliki kepentingan dalam memberikan investor dan kreditor informasi yang berguna dalam mengevaluasi pemerintah atau kemampuan unit tertentu untuk membiayai kegiatan-kegiatannya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen.

- ## 3. Pelaporan keuangan pemerintah yang baik juga akan memberikan persepsi lembaga pemeringkat pemberi kredit, investasi, dan lainnya. Berdasarkan rangking lembaga pemeringkat maka citra Negara akan meningkat dan dapat mengundang para investor untuk berinvestasi ke dalam negeri baik langsung maupun portofolio dalam bentuk saham atau obligasi pemerintah. Terbukti dengan membaiknya investasi terhadap Negara-negara yang telah menerapkan basis akrual pada akuntansi pemerintahan mereka.

b. Tantangan dalam penerapan basis akrual

Masih adanya kekurangan dalam penerapan basis akrual ini mengakibatkan adanya tantangan yang akan muncul ketika penerapan basis akrual. Diantaranya tantangan yang muncul akibat di implementasikannya SAP berbasis akrual adalah :

1. Perbaikan yang harus dilakukan pada system akuntansi dan teknologi yang memadai.
2. Harus tersedianya akuntan yang kompeten

Pelaporan keuangan secara kompeten dan memiliki integritas yang baik. Hal ini yang menyebabkan perlunya SDM yang baik dan terlebih menguasai akuntansi pemerintahan.

Selain dari dua tantangan di atas, Simanjuntak (2010) menjelaskan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan basis akrual secara penuh, yakni :

1. Komitmen Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD (satuan kerja Perangkat daerah) sebagai penerima dana Dekonsentrasi/Tugas pembantuan.

2. Resistensi terhadap perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bias jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan system yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Melihat dari adanya kelebihan dan kekurangan serta peluang dan tantangan dari basis akrual, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menggapai keberhasilan, dalam hal penerapan basis akrual. Bahkan dari tantangan ini juga harus dilakukan persiapan strategi yang perlu diterapkan sebagai berikut :

1. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan akrual.

2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting

Komitemen politik dalam penerapan basis akrual bagi Negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.

3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan

Hasil dan manfaat yang ingin dicapai melalui penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Perlunya tenaga akuntan yang andal

Tenaga akuntan yang professional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual apad akuntansi pemerintahan.

5. System informasi yang memadai

Informasi akuntansu berbasis kas merupakan titik penting penting dalam pergantian basis ke akrual.

6. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat

Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual.

7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi

Penerapan basis akrual tidak hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi

secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan public yang lebih baik. Perubahan ini tidak otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secara berkelanjutan.

Menurut Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan Negara seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Oleh karena itu, perubahan basis akuntansi pemerintah di Indonesia dari kas menuju basis akrual dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan pilihan dari KSAP yang merupakan strategi dalam penyusunan basis akrual yakni penyusunan secara bertahap mulai dengan awal diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 yang di dalamnya mengatur tentang penggunaan basis kas menuju akrual. Kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang secara tegas mengharuskan penggunaan basis akrual dengan bertahap hingga tahun 2014.

Pemilihan strategi penerapan basis akrual secara bertahap ini atas beberapa pertimbangan, antara lain :

- a. SAP berbasis kas menuju akrual telah disusun dengan mengacu pada beberapa referensi bertaraf internasional antara lain IPSAS, sehingga diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang akan disesuaikan menjadi akrual sudah dapat diterima umum.

- b. Mengurangi resistensi dari para pengguna SAP (PP Nomor 24 Tahun 2005) terhadap perubahan basis akuntansi. Pengguna PP Nomor 24 Tahun 2005 masih dalam tahap pembelajaran dan perlu waktu yang cukup lama untuk memahaminya sehingga apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP berbasis kas menuju akrual menimbulkan resistensi.
- c. Penyusunan SAP berbasis akrual relative menjadi lebih mudah karena sebagian dari PSAP berbasis kas menuju akrual telah berbasis akrual sehingga hanya memerlukan penyesuaian beberapa PSAP berbasis akrual.
- d. Penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai dengan pola SAP berbasis kas menuju akrual lebih mudah bagi para pengguna standar karena sudah disosialisasikan, dan para pengguna telah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual.

5. Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual

Secara yudiris, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdampak pada berubahnya haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini tidak dilakukan secara instan tetapi akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015.

Untuk mengejar target pemerintah mengimplementasikan secara penuh pada tahun 2015 nanti, tentu memerlukan strategi jitu. Oleh karena

itu pelaksanaan strategi harus memenuhi dua criteria kondisi dasar, yaitu (1) *necessary condition* dan (2) *sufficient condition*. *Necessary condition* adalah criteria mutlak yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai. Setelahnya, pemerintah dapat mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa berubah menjadi kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*). *Necessary condition* adalah komitmen, kapasitas SDM dan dana pemeliharaan. Tidak hanya kedua criteria tersebut yang harus terpenuhi, ada juga hal yang harus menjadi prasyarat untuk dapat mengimplementasikan basis akrual yang notabeneanya adalah barang baru, yaitu komitmen dari para pemimpin dan pejabat, termasuk dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD serta SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam jumlah yang memadai, mengingat mereka adalah ujung tombak dari implementasi ini. Penerapan basis akrual membutuhkan yang terus menerus, sehingga ada satu unsure lagi yang mutlak harus terpenuhi dalam upaya implementasi basis akrual, yaitu pendanaan yang cukup. Unsur pendanaan tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan.

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari beberapa pihak. Jika penerapan akuntansi basis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah sebagai berikut (Ibrahim dan Abdurrahman, 2013).

a. Melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 2004 yang menyatakan “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sistem Akuntansi dan IT Based System.

b. Komitmen dan Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

c. Tersedianya SDM yang kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

d. Resistensi terhadap perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengubah kondisi menjadi *sufficient condition* dibutuhkan kebijakan akuntansi, prosedur dan teknologi. Pengembangan dokumen kebijakan akuntansi berbasis akrual dibutuhkan untuk mengakomodasi SAP. Idealnya, dokumen ini didesain sedemikian rupa sesuai dengan kondisi khas di daerah masing-masing. Kemudian, dibutuhkan pula sistem dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, sampai dengan penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual penuh. Hal lain yang tak kalah penting, yaitu pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi khususnya aplikasi penatausahaan dan akuntansi yang mengakomodasi basis akrual didalamnya agar implementasi basis akrual ini sesuai dengan harapan.

Menurut KSAP (2010), persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

- a. *Hearing*-standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilaksanakan pada desember 2009.
- b. Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyiapan dan pengembangan SDM akuntansi yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2015.

Setelah syarat-syarat implementasi terpenuhi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan langkah-langkah

penerapan basis akrual di pemerintah daerah. Pada tingkat pusat/nasional, strategi penerapan basis akrual di pemerintah pusat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pedoman umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual.
- b. Pedoman ini digunakan untuk menyamakan persepsi di semua daerah sekaligus sebagai jembatan teknis atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan diterapkan.
- c. Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.
- d. Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan perbandingan. Dengan cara ini, pemerintah dapat memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat digunakan oleh seluruh daerah.
- e. Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Selain sebagai usaha penyamaan persepsi dan sosialisasi, cara ini dapat digunakan untuk menyerap input berupa saran maupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual.

Sedangkan pada tingkat daerah , strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini :

- a. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksanaan teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut : meningkatkan skill pelaksana, membangun dan mengajak keterlibatan semua pihak.

- b. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat local seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan system prosedur.
- c. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Dengan adanya langkah-langkah strategi untuk mengimplementasikan basis akuntansi yang baru ini serta ditunjang dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka diharapkan pemerintah kita siap mempraktikkan akuntansi berbasis akru

6. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan dicetuskannya PP Nomor 77 Tahun 2010, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi pemerintah untuk menerapkan basis akrual.

Namun karena pemerintah belum sanggup merealisasikan dalam lima tahun pertama, yakni pada tahun 2008, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang waktu, yaitu lima tahun lagi hingga tahun 2015, terhitung sejak dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Untuk menerapkan akrual basis, diperlukan komitmen dari pimpinan yang selanjutnya komitmen tersebut harus ditransferkan ke seluruh pelaksana. Bukti adanya komitmen pimpinan dan pemahaman para pelaksana tersebut dieksperimekan dengan membangun infrastruktur yang dapat menunjang implementasi basis akrual. Bagi IAI (2014), infrastruktur tersebut dapat menyediakan informasi berupa sebagai berikut:

- a. Informasi yang dapat memberikan pemahaman terhadap posisi dan eksistensi entitas pemerintahan.
- b. Informasi yang dapat memberikan pemahaman atas transaksi keuangan yang dilakukan dan atau melibatkan entitas pemerintahan.
- c. Informasi mengenai waktu terjadinya transaksi.
- d. Informasi yang dapat memberikan instrument untuk mengukur asersi penilaian atas transaksi tersebut.

7. Pokok-pokok Penerapan SAP Berbasis Akrua

Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP. Pokok-pokok penerapan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang perlu diketahui untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi akrual, sebagai berikut :

a. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan³¹. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- 1) Pemerintah pusat
- 2) Pemerintah daerah
- 3) Masing-masing kementerian atau lembaga di lingkungan pemerinta pusat.

- 4) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

b. Penerapan Laporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

c. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

8. pengaruh Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan SAP berbasis AkruaI

Dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual peran teknologi informasi merupakan salah satu factor yang cukup menentukan. Penciptaan suatu informasi yang efektif membutuhkan suatu pengorganisasian untuk mengembangkan sejumlah sistem-sistem pendukung. Penarikan staf yang kompeten dan layak adalah suatu tindakan yang sangat penting. Investasi yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung system yang lain adalah sesuatu yang penting, namun tanpa manusia bersumber daya yang kompeten untuk mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informasi tergantung dari beberapa hal yaitu akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan dapat dimengerti.

Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai alat control yang menghasilkan informasi dapat digunakan sebagai pendukung sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang lebih ditetapkan.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya dan untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi yang jelas sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu katakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

9. Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Pengelolaan keuangan Negara yang ditujukan agar bisa digunakan penyelenggaraan pemerintahan secara rutin itu cukup banyak menggunakan sumber dana. Sumber dana tersebut diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri yang dikelola secara ketat oleh pemerintah berdasarkan konsepsional dan konstitusional ditetapkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup pengelolaan keuangan Negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di

bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor public dan swasta.

Tujuan akuntansi sektor public adalah :

a. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk waktu yang tepat, uang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orgn atau badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggungjawaban perhitungan.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut public sector Commite-IFAC menjelaskan tujuan akuntansi sektor public dipilah dalam tujuan umum dan khusus. Tujuan umum akuntansi sektor public adalah memberikan informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pemakai. Sedangkan

tujuan akuntansi sektor public secara khusus adalah mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui legislative secara umum dan menyediakan informasi tentang alokasi sumber daya, memenuhi kewajibannya, kondisi keuangan, cara sektor public membiayai aktifitas dan performa organisasi sektor public terutama yang terkait dengan biaya operasi dan pencapaian target.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor public bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan informasi kegiatan ekonomi sektor public yang kemudian dijadikan alat pertanggungjawaban dan pengawasan. Akuntansi sektor public memiliki fungsi untuk menyediakan informasi dalam rangka mendukung keputusan manajerial agar organisasi sektor public.

B. Tinjauan Empiris

Kamelya Sandra dan Bambang Satriawan (2016), Analisis studi Komparatif dasar pencatatan Berbasis Kas dengan Berbasis AkruaI terhadap Keakuratan Informasi Laporan Keuangan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, bertujuan untuk mengetahui perbedaan, mengevaluasi, menganalisa kesesuaian antar dasar pencatatan berbasis kas dan berbasis akruaI. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kuantitatif dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas (signifikansi) dengan Equal Variance Not Assumed (diasumsikan kedua tidak sama) adalah 0,028 lebih kecil dari 0,05 maka kedua varian adalah berbeda.

Sony Lamonisi (2016), Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Tomohon, bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Tomohon dalam penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrua. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrua telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrua. Pemerintah Kota Tomohon sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang dilakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrua. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon mengenai SAP berbasis akrua, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrua tersebut.

Fadhila Sukma dan Vita Fitria Sari (2017), Analisis Manfaat Basis Akrua dan Basis Kas menuju Akrua dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah (studi empiris pada opd di kota Padang), yang menggunakan teknis analisis Deskriptif Kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan perbandingan manfaat basis akrua dan basis kas menuju akrua berdasarkan kuesioner yang disebar di Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang. Jawaban dari responden telah dikelompokkan menjadi dua, yaitu tidak bermanfaat dan bermanfaat. Tidak bermanfaat mempresentasikan jawaban responden yang memilih opsi tidak bermanfaat dan kurang bermanfaat.

Baries Ferryono (2017), Manfaat Akuntansi Bernasi AkruaI dan Akuntansi Berbasis kas menuju AkruaI dalm Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah, dengan menggunakan teknis analisis Deskriptif Kuantitatif yang hasilnya menunjukkan hal itu metode akuntansi akruaI memberikan informasi yang lebih bermanfaat dari pada kas untk metode akuntansi akruaI. Selain itu responden melaporkan bahwa mereka melakukan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menggunakan sistem akuntansi akruaI. Demikian, peletihan lebih lanjut dalam metode akuntansi akruaI sangat penting.

Agnes Avira (2015), Tinjauan Perbedaan Persepsi antara Penyusun dan Pengguna Lapora Keuangan di Daerah dalam rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (studi kasus pada Pemkab Grobongan) dengan menggunakan teknik analisis Deskriptif Kuantitatif dengan hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna mengenai penerapan akuntansi berbasis akruaI.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

N0	PENULIS	JUDUL	JENIS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Kamelya Sandra dan Bambang Satriawan (2016)	Analisis studi komparatif dasar pencatatan berbasis kas dengan berbasis akruaI terhadap keakuratan informasi laporan keuangan pada kantor kesehatan pelabuhan kelas i batam	Deskriptif Kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas (signifikansi) dengan Equal Variance not Assumed (diasumsikan kedua tidak sama) adalah 0,028 lebih kecil dari 0,05 maka kedua varian adalah berbeda.

2	Sony Lamonisi (2016)	Analisis penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah kota tomohon	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Pemerintah Kota Tomohon sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang dilakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut.</p>
3.	Fadhilah Sukma dan	Analisis manfaat basis akrual dan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis deskriptif diatas menunjukan

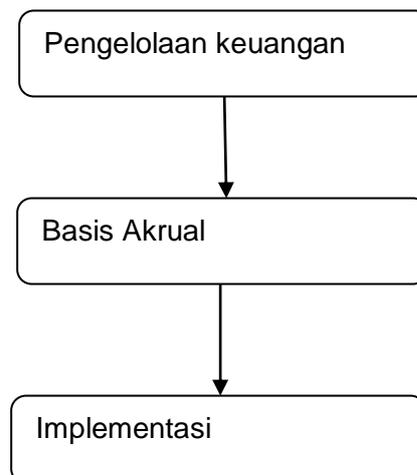
	Vita Fitria Sari (2017)	basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah (studi empiris pada opd di kota padang)		perbandingan manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual berdasarkan kuesioner yang disebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota padang padang. Jawaban dari responden telah dikelompokkan menjadi dua, yaitu tidak bermanfaat dan bermanfaat. Tidak bermanfaat merepresentasikan jawaban responden yang memilih opsi tidak bermanfaat dan kurang bermanfaat.
4.	Baries Ferryono (2017)	Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah.	Deskriptif Kuantitatif	Hasilnya menunjukkan hal itu Metode akuntansi akrual memberikan informasi yang lebih bermanfaat daripada cash untuk metode akuntansi akrual. Selain itu, responden melaporkan bahwa mereka melakukannya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menggunakan sistem akuntansi akrual. Demikian, Pelatihan lebih lanjut dalam metode akuntansi akrual sangat penting.
5.	Agnes evira (2015)	Tinjauan perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna mengenai penerapan akuntansi

		keuangan di daerah dalam rangka perubahan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual (studi kasus pada pemkab grobogan).		berbasis akrual. penyusun lebih memahami akrual basic dari sisi ketaatan terhadap peraturannya, sedangkan bagi para pengguna memahami akrual basic dari sisi kemanfaatan informasi dari laporan yang dihasilkannya.
6.	Mohammad Man Azwan (2016)	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual	Penelitian Deskriptif	SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari Kualitas Sumber Daya Manusia adalah dalam kategori siap dan untuk ketersediaan Sistem Informasi adalah dalam kategori siap. Hal tersebut didukung dengan adanya persiapan bimbingan teknis yang telah dilakukan terhadap pegawai SKPD, ketersediaan SIMDA serta adanya peraturan Bupati yang dikeluarkan.
7.	Fadilah Madjid (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi berbasis Akrual di Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah daerah sudah sangat baik. Khususnya pada tingkat implementasi akuntansi akrual dipengaruhi oleh ketersediaan system informasi serta kualitas sumber daya manusia. Namun, tidak ada pengaruh komitmen pelaksanaan dan pengembangan

				regulasi terhadap penerapan akuntansi akrual.
8	Neni Rahmawati (2016)	Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di secretariat DPRD kabupaten Malang berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Deskriptif Kualitatif	Secara umum, pegawai secretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan penuh oleh secretariat DPRD Kabupaten Malang pada Tahun anggaran 2016

C. Kerangka Konsep

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konsep. Kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui wawancara sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi sistem akuntansi basis akrual pada pengelolaan keuangan sektor publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Peneliti merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi sistem akuntansi akrual pada Pemerintah Daerah kabupaten Soppeng.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Berlokasi di jalan Salotungo Kabupaten Soppeng pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng.

D. Sumber Data

1. Data primer

Menurut Anwar Sanusi (2014), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer

yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan sektor public.

2. Data Sekunder

Menurut Anwar Sanusi (2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkann data tersebut menurut kebutuhannya. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan seperti dokumen serta beberapa dokumentasi.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan dukungan alat bantu seperti buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera untuk bukti konkrit jika memang benar melakukan wawancara dengan pihak yang memahami permasalahan.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2013) dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita media *online*, arsip-arsip tertulis dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ataupun dokumentasi eksternal berisi

bahan-bahan informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet berkaitan yang membantu penelitian.

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam atau social (Anwar Sanusi). Instrument pendukung yang berfungsi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah alat bantu seperti, pedoman wawancara, buku tulis serta pena agar proses wawancara dapat berjalan dengan benar.

1. Wawancara

Penelitian juga akan menyediakan beberapa pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini untuk ditanyakan ke beberapa pihak yang berkepentingan.

G. Teknik Analisis

Menurut Mc Drudy (Moleong, 2014:248) mengatakan bahwa analisis data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Dalam hal penelitian kualitatif penyajian dalam menyajikan data selain data bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis

matrik, gambar atau skema, jaringan, kaitan kegiatan dan juga table sebagai pendukung narasi.

3. Penerikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peratyrn-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan data dapat di pertanggung jawabkan.

BAB IV

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten soppeng adalah salah satu wilayah yang mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng.

Secara administrative Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung dan 1.163 Rukun tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya.

B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng bahwa tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng adalah melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan urusan teknis di bidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan,
- e. Pengelolaan unit pelaksana Tejnis Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi a. Perumusan kebijakan teknis dinas.

- b. Penyusunan rencan strategis dinas.
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengawan program dan kegiatan dinas.
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyelenggaraan, dan kondisi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga.
 - b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
 - f. Pelaksanaan monitoring tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan Asli Daerah

1. Bidang Pendapatan Asli daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dari fungsinya.

Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Seksi pajak daerah, bertugas :

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah.
- c. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah serta data potensi pajak daerah.
- d. Membuat kebijakan bisnis pemungutan pajak daerah meliputi pendapatan, penetapan penerimaan, penyetoran dan penaguhan.

2. Seksi retribusi daerah, bertugas :

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah serta data potensi retribusi daerah.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tersebut

3. Seksi lain-lain PAD yang sah, bertugas :

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lain-lain PAD yang sah serta data potensi lain-lain PAD yang sah.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

Bidang Anggaran

1. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Anggaran meliputi Penyusunan APBD, Otorisasi DPA SKPD dan perbendaharaan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyeusunan kebijakan teknis bidang
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengadilan, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari:

1. Seksi penyusunan APBD

Seksi penyusunan APBD mempunyai tugas antar lain:

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pengkajian kebijakan pengalokasian daerah.
- c. Menyiapkan bahan perumusan pedoman penyusunan APBD.
- d. Melaksanakan rekapitulasi, dokumen anggaran dan perubahan anggaran.

2. Seksi perbendaharaan

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyusun rencana sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perbendaharaan.
- c. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Akuntansi

1. Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Akuntansi meliputi Penerimaan dan Pengeuaran kas, Akuntansi Aset, dan Penyusunan Laporan Keuangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang akuntansi terdiri dari:

1. Seksi akuntansi penerimaan dan peneluaran kas

Seksi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman/pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran kas.
- c. Melakukan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- d. Melaksanakan pencatatan dan penggolongan berdasarkan rincian objek penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

2. Seksi akuntansi aset

Seksi akuntansi aset mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan akuntansi aset.

- c. Melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan aset.
- d. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang berkenaan dengan aset secara periodik (semesteran dan laporan akhir bulanan).

3. Seksi penyusunan laporan keuangan

Seksi penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakann penyelenggaraan laporan keuangan.
- c. Mengumpulkan data, menganalisis dan menyusun laporan semesteran dan prognosis APBD tahun anggaran yang berkenan.
- d. Malaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungb jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran yang berkenan.

Bidang Aset

1. Bidang asset dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas merencanakan dan memutuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelakasanaan tugas di Bidang Aset meliputi Perencanaan kebutuhan, Distribusi, serta Inventarisasi dan Penghapusan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Dana Perimbangan

1. Bidang Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusun kebijakan teknis bidang.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kebijakan kepala seksi dalam lingkup bidang.
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Visi Dan Misi

1. Visi

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng tidak terlepas dari

visi dan misi kepala Daerah Kabupaten Soppeng yaitu” Pemerintah yang melayani dan lebih baik.

Berdasarkan Visi dan Misi kepala Daerah Kabupaten Soppeng tersebut, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng adalah “ Tercapainya pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten soppeng yang terukur dan rasional”.

2. Misi

untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan serta efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan.
3. Meningkatkan sumber daya aparatur.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

Kebijakan akuntansi disusun tiap pemerintah daerah berdasarkan panduan penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Peraturan Menteri. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah wajib ditetapkan oleh sebuah peraturan daerah sesuai pasal 4, terdiri atas (1) kebijakan pelaporan LK dalam berbagai PSAP 01,02,03,04,11 dan 12 yang menjadi unsur Lk sesuai dengan pasal 4. (2) kebijakan akuntansi terpilih oleh pemerintah daerah tersebut untuk setiap pos LK atau akun Buku Besar seperti PSAP 05.06,07,08,10, IPSAS dan Bultek terkait PSAP tertentu sesuai pasal 4. (3) Berlaku bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam pemerintah daerah tersebut. Untuk menjamin kelayakan penerapan PSAP 11, Kebijakan pelaporan LK, Kebijakan periode laporan, dan kebijakan akuntansi terpilih bagi entitas akuntansi pemerintah daerah yaitu SKPD dan PPKD serta entitas pelaporan pemerintah daerah tersebut.

Berbagai hal penting dalam panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pengutipan SAP atau PSAP harus dilakukan secara terpilih dan berazas guna bagi pengguna pemerintah daerah kebijakan akuntansi, sambil mewaspadaai risiko peraturan daerah menjadi terlampau tebal dan menjadi sulit diterapkan.
- b. Menyalin sebagian besar SAP atau PSAP tertentu sebagai bagian peraturan daerah kebijakan akuntansi sedapat mungkin dihindari.

- c. Landasan berfikir pemilihan suatu metode akuntansi yang paling tepat bagi suatu pemerintah daerah tertentu mungkin adalah berbagai buku teks akuntansi atau sumber lain yang berkualitas tinggi.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal. Ruang lingkup kebijakan ini terdiri atas :

- a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini membahas :
- 1). Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi
 - 2). Lingkungan akuntansi pemerintah
 - 3). Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
 - 4). Entitas akuntansi dan Entitas pelaporan
 - 5). Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum
 - 6). Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam pelaporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi
 - 7). Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukuran.
- b. Penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi

laporan keuangan . laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Neraca
- 3) Laporan Oprasional
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas
- 6) Catatan atas Laporan Keuangan

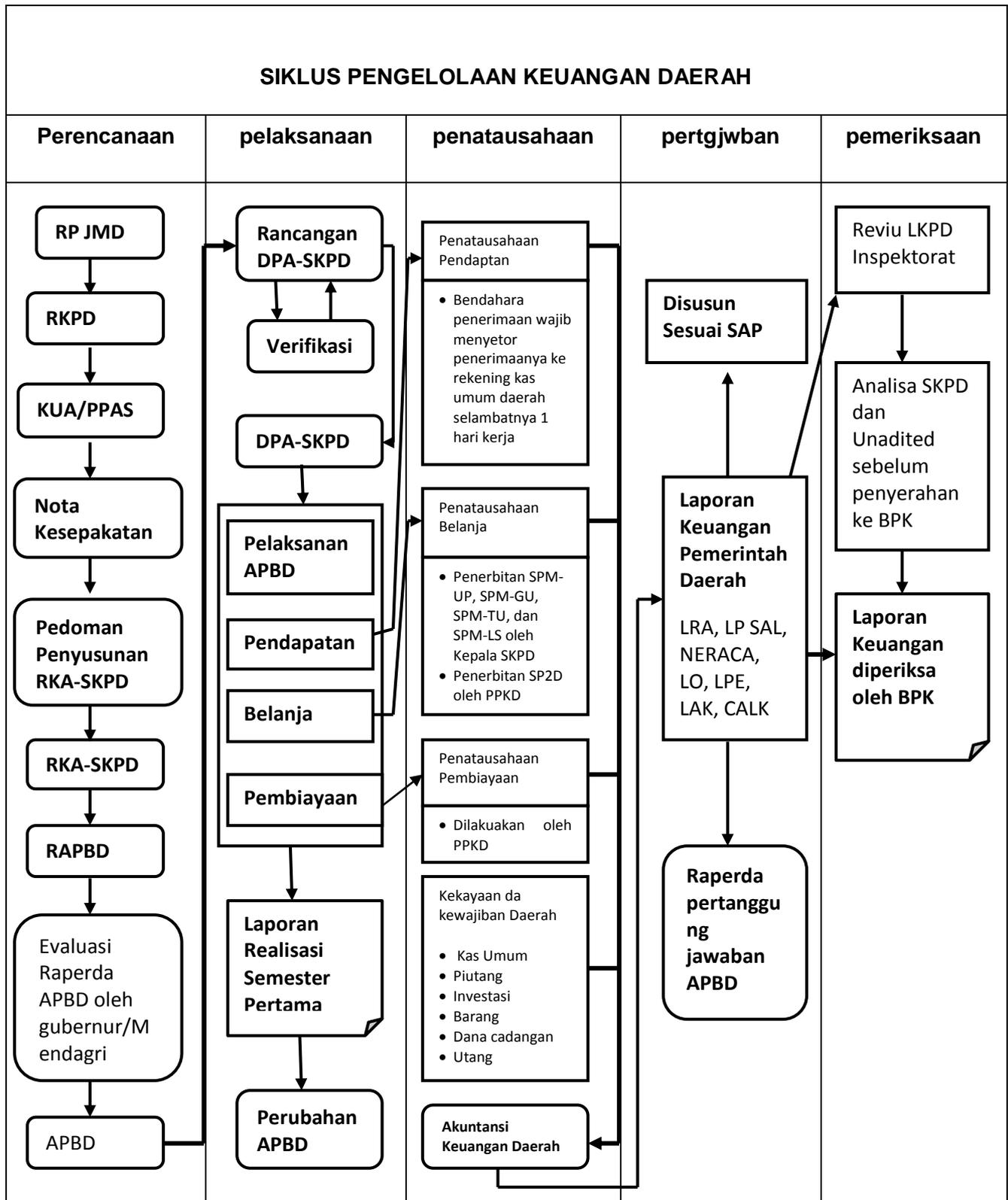
B. Sistem Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daereah Kabupaten Soppeng

Sistem akuntansi yang diterapkan di pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/PERBUP/XI/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

a. Flowchart

Flowchart adalah suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma yang berurutan dalam sistem.

Berikut ini merupakan flowchart pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Soppeng.



Sumber : BPKD Kabupaten Soppeng

Proses penyusunan pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD(KUA) dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama dengan DPRD untuk menghasilkan sebuah nota kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, KDH menyampaikan surat edaran yang berisi pedoman penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD. Selanjutnya melakukan komplikasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. Kemudian Perda APBD baru dapat dilakukan jika gubernur/Mendagri menyatakan bahwa perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PPKD membuat surat pemberitahuan berdasarkan perda APBD dan menyerahkan surat pemberitahuan kepada SKPD dan SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan perda APBD selanjutnya melakukan verifikasi rancangan. Setelah disetujui DPS-SKPD melakukan pelaksanaan APBD yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menghasilkan laporan semester pertama. Berdasarkan perubahan APBD dimana penatausahaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta kekayaan dan kewajiban daerah yang dilakukan oleh PPKD menghasilkan Akuntansi Keuangan Daerah.

Akuntansi keuangan daerah dimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disuse sesuai SAP dan Raperda pertanggungjawaban APBD, dimana dilakukan rewiu LKPD Inspektorat yang kemudian dianalisa SKPD dan tidak diaudit sebelum penyerahan ke BPK, kemudian Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK.

C. Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Adapun bentuk laporan keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	(%)	Realisasi 2016
1	Pendapatan	1.131.991.996.848,00	1.155.718.382.299,00	102.10%	1.226.295.327.432,74
2	Jumlah Belanja Dan Transfer	1.234.881.325.604,00	1.147.130.284.653,00	92.89%	1.200.412.475.086,30
3	Surplus / (Defisit)	(102.889.328.756,00)	8.588.097.646,00	-8.35%	25.882.897.346,44
4	Pembiayaan Netto	102.889.328.756,00	103.191.980.882,82	100.29%	84.307.622.411,38
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	111.780.078.528,82	-	110.190.519.757,82

Sumber :BPKD Kabupaten Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan Daerah TA 2017 terealisasi sebesar Rp.1.155.718.382.229,00 dari anggaran sebesar Rp.1.131.991.996.848,00. Realisasi pendapatan daerah TA 2017 menurun sebesar Rp. 70.576.990.133,74 dibandingkan realisasi TA 2016 sebesar Rp. 1.226.295.327.432,74. Belanja dan Transfer TA 2017 sebesar Rp. 1.147.130.284.653,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.234.881.325.604,00 menurun sebesar Rp.53.282.190.433,30 dibandingkan realisasi TA 2016 sebesar Rp. 1.200.412.475.086,30.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Tabel 5.2 Laporan Operasional

No	Uraian	2017	2016
1	Pendapatan Asli Daerah	137.429.416.676.,86	134.334.308.772,18
2	Pendapatan Transfer	973.175.124.516,00	1.088.874.285.338,50
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	33.388.813.439,00	14.255.980.488,00
4	Jumlah Pendaptan	1.143.993.354.631,87	1.237.474.574.598,68
5	Beban	948.978.672.702,58	1.031.545.955.760,15
6	Surplus/Defisit Dari Operasional	195.014.681.929,29	205.928.618.838,53
7	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(1.800.578.995,65)	(358.252.977,70)
8	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	193.214.402.933,64	205.570.365.860,83
9	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
10	Surplus/Defisit LO	193.214.102.933,64	205.570.365.860,83

Sumber: BPKD Kabupaten Soppeng

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp. 1.143.993.354.631,87 menurun sebesar

Rp.93.481.219.966,81 dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp. 1.237.474.574.598,68.

c. Laporan Arus kas

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Tabel 5.3 Laporan Arus kas

No	Uraian	2017	2016
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	307.431.476.375,00	374.356.131.505,44
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(305.763.306.885,00)	(353.422.789.544,00)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	65.227.333,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	272.886.341,00	0,00
5	Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	1.941.055.831,00	20.998.569.294,44
6	Saldo Awal Kas dan Setara Kas Di BUD	105.505.343.769,82	84.381.623.750,38
7	Saldo Awal Kas Di Bendahara Pengeluaran	660.000,00	0,00
8	Saldo Awal Kas Di BLUD	1.704.763.206,00	2.944.286.242,00
9	Saldo Awal Kas Di FKTP	2.983.752.782,00	1.916.485.086,00
10	Saldo Awal Kas Di Dana Bos	9.993.124,00	0,00
11	Saldo Akhir Kas DI BUD	112.141.568.712,82	110.240.964.372,82
12	Saldo Akhir Kas Di Dana Bos	0,00	9.993.124,00
13	Saldo Akhir Kas	112.141.568.712,82	110.250.957.496,82

Sumber :BPKD Kabupaten Soppeng

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2017 sebesar Rp. 307.431.476.375,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 66.924.655.130,44 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 374.356.131.505,44. Saldo Akhir Kas pada tahun 2017 sebesar Rp. 112.141.568.712,82 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 110.250.957.496,82.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2017	2016
1	Ekuitas Awal	1.889.239.917.271,35	1.394.767.116.417,74
2	Surplus/Defisit LO	193.214.102.933,64	205.570.365.860,83
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisi Revaluasi Aset Tetap	0,00	306.709.832.135,00
6	Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap	4.876.028.184,00	(17.858.883.895,35)
7	Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Piutang	(82.734.353,00)	(1.795.753.408,52)
8	Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Utang	(874.199.569,75)	(72.792.437,00)
9	Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Persediaan	(24.868.492,000)	551.283.014,16
11	Kenaikan/Penurunan Nilai Aset lainnya	(133.116.000,00)	(1.526.021.251,81)
12	Kenaikan/Penurunan Nilai Kas	(8.531.999,00)	(81.848.340,00)
13	Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi	13.322.134,00	34.840.381,00
14	Koreksi Pendapatan Diterima DiMuka	0,00	0,00
15	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.727.907.577,08)	5.066.409.143,95
16	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(501.896.443,80)	(3.885.885.837,89)
17	Koreksi Atas Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	(55.690.000,00)
18	Koreksi Atas Penyisihan Piutang Pajak	0,00	1.712.666.911,00
19	Koreksi Atas Penyisihan Piutang Retribusi	229.500,00	0,00
20	Koreksi Atas Penyisihan Piutang BLUD	16.100,00	(14.633.959,60)
21	Koreksi Atas Penyisihan Piutang Transfer	43.353.986,77	118.912.237,84
22	Ekuitas Akhir	2.079.033.715.675,13	1.889.239.917.271,35

Sumber : BPKD Kabupaten Soppeng

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ekuitas dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 189.793.798.403,78

e. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Tabel 5.5 Neraca

No	Uraian	2017	2016
1	Aset Lancar	160.831.238.533,34	144.490.657.694,46
2	Investasi Jangka Panjang	24.064.139.262,63	21.283.774.247,63
3	Aset Tetap	1.886.038.644.344,22	1.742.563.025.624,34
4	Aset Lainnya	24.631.494.539,23	23.837.846.867,13
5	Jumlah Aset	2.095.265.516.679,41	1.932.175.304.433,56
6	Kewajiban	16.231.801.004,28	42.935.389.162,21
7	Ekuitas	2.079.033.715.675,13	1.889.238.917.271,35
8	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.095.265.516.679,41	1.932.175.304.433,56

Sumber : BPKD Kabupaten Soppeng

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan dari jumlah aset dari tahun 2016 ke tahun 2017, disebabkan karena adanya penambahan aset dan investasi jangka panjang. Sedangkan kewajiban mengalami penurunan ditahun 2017 sebesar Rp. 26.703.588.157,93 dan ekuitas mengalami peningkatan sebesar 189.794.798.403,78.

D. Implementasi Akuntansi Basis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

1. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI

Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng diterapkan secara penuh pada Tahun 2015 yang sebelumnya menerapkan basis kas menuju

akrual dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Diterapkannya Standar baru tersebut diharapkan dapat lebih membawa dampak baik bagi pengelolaan keuangan pemerintah dibandingkan jika sektor publik hanya menggunakan basis kas. Selain itu, sistem akuntansi akrual mencerminkan komitmen jangka panjang organisasi dan kondisi keuangan yang lebih akurat dan terperinci secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual membawa keuntungan pemerintah yang lebih menggambarkan secara akurat dan terperinci mengenai pencatatan mulai dari tahap penganggaran sampai pada pelaporan. Pelaporan berbasis akrual memungkinkan pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.

2. Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis akrual

Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak mengalami hambatan, lebih-lebih lagi jika pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Berikut beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah :

a. komitmen dari pimpinan

Seorang pemimpin yang mempunyai komitmen dan keyakinan kuat terhadap suatu perubahan yang akan membawa organisasinya kearah yang lebih baik, secara otomatis individu yang berada dalam organisasi tersebut akan merasa optimis dan yakin dengan apa yang mereka kerjakan. Apalagi perubahan itu dipercaya dapat menunjang kinerja dan kemajuan organisasi dimana mereka bekerja, maka telah sepatutnya komitmen kuat dan rasa optimis tersebut dimiliki oleh setiap pimpinan. Ditambah ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai landasan hukum.

Pemerintah dalam hal ini Bupati Soppeng dan Kepala Dinas BPKD juga merasa betapa pentingnya perubahan SAP ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait penerapan SAP berbasis akrual agar dapat berjalan optimal. Adanya regulasi yang jelas baik sistem, prosedur maupun kebijakan akuntansi menambah keyakinan aparatur selaku pelaksana kebijakan untuk lebih memaksimalkan kinerjanya sehingga manfaat dari SAP berbasis akrual ini dapat dirasakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini bupati maupun kepala badan BPKD Kabupaten Soppeng mengenai komitmen dari pimpinan telah menerima perubahan SAP tersebut sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan dan telah sepenuhnya mendukung penerapan SAP berbasis akrual.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkompeten merupakan faktor penting bagi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, sebab SDM yang berkerja dan turun langsung menjalankannya. Saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM dibidang akuntansi pemerintahan. Untuk menerapkan basis akrual, diperlukan pemahaman khusus. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan implementasi basis akrual ini. Pemahaman staf mengenai SAP berbasis akrual di BPKD belum begitu menyeluruh. Berikut pernyataan yang di berikan oleh Kasubag keuangan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa staf di BPKD belum sepenuhnya paham mengenai penerapan SAP berbasis akrual. Masih kurangnya staf yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan. Namun, langkah untuk memahami SAP berbasis akrual sudah mulai di tempuh.

3. Strategi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Melihat dari adanya tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual, maka ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan untuk menggapai keberhasilan, dalam hal penerapan basis akrual. Maka harus dilakukan beberapa persiapan strategi yang dapat menunjang keberhasilan basis akrual tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dapat disimpulkan bahwa BPKD sudah menyiapkan beberapa strategi yang dapat menunjang keberhasilan penerapan basis akrual tersebut di antaranya melakukan sosialisasi terkait dengan Akuntansi Berbasis akrual serta mengembang Aplikasi yang berbasis Akrual.

4. Keunggulan pencatatan akuntansi berbasis akrual

Terdapat beberapa keunggulan dalam pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual sebagai berikut :

1. metode basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. beban diakui saat terjadinya transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
3. pendapatan diakui saat terjadinya transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
4. setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
5. laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.
6. adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan mengenai keunggulan akuntansi berbasis akrual, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, transparansi pengelolaan keuangan lebih terlihat karena mampu menguraikan secara rinci alur dari setiap transaksi keuangan ditambah

laporan keuangan yang dihasilkan mampu menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya sebab memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat.

E. Pembahasan

Penerapan Akuntansi berbasis AkruaI pada Pemerintah Kabupaten Soppeng diterapkan pada Tahun 2015 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Dampak yang dihasilkan dari penerapan akuntansi akruaI secara penuh yaitu transaksi lebih transparan dan realtime.

Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Soppeng dalam persiapan penerapan basis akruaI adalah menyiapkan regulasi terkait penerapan Standar Akuntansi berbasis AkruaI antara lain merevisi kebijakan Akuntansi, dan menyusun Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD dan SKPD dan meningkatkan Sumber Daya pengelolaan keuangan dengan mengikutsertakan pada kegiatan Bimtek, Workshop, dan Sosialisai terkait Akuntansi berbasis AkruaI serta Mengembangkan Aplikasi berbasis AkruaI.

Keunggulan pencatatan akuntansi secara basis akruaI adalah dapat menyediakan gambaran operasional pemerintahan yang lebih transparan, Menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, Menilai kinerja posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, Sebagai bahan pengambilan keputusan bagaimana pemerintah mendanai kegiatan sesuai dengan kemampuan pendanaannya, dan pelaporan berbasis akruaI bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.

Secara signifikan Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagai pelaksana pengelola, oleh karena itu meningkat Sumber Daya Manusia yang kompeten sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis tentang implementasi sistem akuntansi basis akrual pada pengelolaan keuangan sektor publik, diperoleh hasil bahwa :

Penerapan Sistem Akuntansi Akrual Basis di Pemerintah Kabupaten Soppeng di terapkan pada tahun 2015 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi yang diterapkan di Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/PERBUP/XI/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dan dampak yang dihasilkan dari penerapan akuntansi akrual secara penuh yaitu transaksi lebih transparan dan realtime.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai Penerapan sistem akuntansi basis akrual, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu penerapan sistem akuntansi akrual basis pada Pemerintah Kabupaten Soppeng diterapkan pada Tahun 2015 sesuai dengan permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi yang diterapkan di kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 36/PERBUP/XI/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dan dampak yang dihasilkan dari penerapan akuntansi akrual secara penuh yaitu transaksi lebih transparan dan realtime.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng, maka peneliti memberi saran yang dapat berguna bagi pihak BPKD maupun kepada peneliti selanjutnya :

1. Pemerintah kabupaten soppeng terkhusus BPKD Kabupaten Soppeng sebaiknya lebih meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan.
2. BPKD diharapkan melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan penerapan basis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwan, M. M. 2015. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI : Sebuah Analisis Deskriptif*, (Online), Jurnal, (<http://repository.unhas.ac.id>, diakses 1 Januari 1018).
- Elsye, R., Suwanda, D., dan Muchidin, U. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- Evira, A. 2015. *Tinjauan Perbedaan Persepsi antara Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan di Daerah dalam Rangka Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Sasus pada Pemkab Grobogan)*, (Online), Jurnal, Vol. 13, No. 1, ISSN :1693-0827, (<http://www.neliti.com>, diakses 1 Januari 2018).
- Ferryono, B. 2017. *Manfaat Akuntansi Basis AkruaI dan Akuntansi Basis Kas Menuju AkruaI dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah*, (Online), Jurnal, Vol. 4, No.1, (<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAB/index>, diakses 1 Januari 2018).
- Ibrahim, P. 2013. *Akuntansi AkruaI dan Penerapannya Di Sektor Publik: Telaah Pustaka*,(Online), Jurnal, (<http:// repository.unhas.ac.id>, diakses 1 Januari 2018).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP
- Lamonisin, S. 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Kota Tomohon*, (Online), Jurnal, Vol. 4, No. 1, ISSN :2303-1174, (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index>, diakses 1 Januari 2018).
- Madjid, F. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)*, (Online), Jurnal (<https://core.ac.uk>, diakses 1 Januari2018).
- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Rahmawati, S. 2016. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*, (Online), Jurnal, (<http://www.neliti.com>, diakses 1 Januari 2018).

- Sandra, K. dan Satriawan, B. 2016. *Analisis Studi Komparatif Dasar Pencatatan Berbasis Kas dengan Berbasis AkruaI terhadap Keakuratan Informasi Laporan Keuangan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan KelasI Batam*, (Online), Jurnal, Vol. 9, No. 2, ISSN :2087-7315, (<http://ejurnal.univbatam.ac.id/index>, diakses 1 Januari 2018).
- Sanusi , Anwar. 2014. *Metodologi Penelitain Bisnis*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Simajuntak, B.H. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Kongres XI IAI: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung .
- Sukma, F. dan Sari, V. F. 2017. *Analisis Manfaat Basis AkruaI Dan Basis Kas Menuju AkruaI Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Di Kota Padang)*, (Online), Jurnal, Vol. 5, No. 2, (<http://ejournal.unp.ac.id/index>, diakses 1 Januari 2018).

L

A

M

P

I

R

A

N

Hasil Wawancara

1. Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi Pemerintahan di Kabupaten Soppeng ?

Informan :

Ya, saya rasa basis akrual ini betul-betul menggambarkan secara lebih rinci mengenai pencatatan mulai dari penganggaran sampai pada pelaporan. Walaupun penerimaan masih dibendahara atau baru pada saat dianggarkan sudah dapat diakui, jadi semuanya bias tergambar dengan jelas.

2. Apakah tantangan atau kendala yang dihadapi selama menerapkan akuntansi basis akrual dari segi komitmen dari pimpinan dan Sumber Daya Manusia ?

Informan :

- a. Apakah pimpinan telah sepenuhnya mendukung tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah ini ?

Informan : ya, sangat mendukung, kalau dari kepala badan sangat mendukung, bupati secara tidak langsung tentunya mendukung juga karena pemerintah dalam hal ini kepala daerah tentunya sudah diberi pengarahan juga dari kementerian keuangan dalam hal penerapan SAP basis akrual.

- b. Apakah staf sudah sepenuhnya paham dengan penerapan akuntansi berbasis akrual ?

Informan : masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan pada tingkat SKPD dan PPKD.

3. Strategi apa yang dilakukan pemerintah kabupaten soppeng dalam persiapan penerapan basis akrual secara penuh ?

Informan

“Ya, kami menyiapkan regulasi terkait penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual, antara lain merevisi kebijakan akuntansi, dan menyusun sistem dan prosedur Akuntansi PPKD dan SPKD, selanjutnya meningkatkan Sumber Daya Pengelolaan Keuangan dengan mengikutsertakan pada kegiatan Bimptek, Workshop, dan sosialisasi terkait Akuntansi Berbasis Akrual serta mengembangkan Aplikasi Berbasis Akrual “.

4. Apa keunggulan dan kelemahan pencatatan akuntansi secara akrual basis?

Informan :

“Keunggulan pencatatan akuntansi basis akrual adalah (1) Dapat menyediakan gambaran operasional pemerintahan yang lebih transparan (2) Menghasilkan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel (3) Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas(4) Sebagai bahan pengambilan keputusan, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya (4) Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah”.

5. Bagaimana sistem penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah kabupaten soppeng ?

Informan :

“Sistem akuntansi yang diterapkan di kabupaten soppeng mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/PERBUP/XI/2014 tentang sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng”.

6. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari penerapan akuntansi akrual secara penuh ?

Informan :

Ya, dampak yang dihasilkan dari penerapan tersebut yaitu transaksi lebih transparan dan realtime.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Anggaran 2017	Realisasi 2017	(%)	Realisasi 2016
1	PENDAPATAN	1,131,991,996,848.00	1,155,718,382,299.00	102.10%	1,226,295,372,432.74
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	115,309,170,743.00	125,892,548,021.00	109.18%	91,123,526,502.24
3	Pendapatan Pajak Daerah	11,738,000,000.00	14,730,111,288.00	125.49%	11,945,173,586.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7,423,334,400.00	8,072,513,217.00	108.75%	8,127,529,236.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,000,000,000.00	15,056,096,674.38	115.82%	13,050,651,239.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83,147,836,343.00	88,033,826,841.62	105.88%	58,000,172,441.24
7	PENDAPATAN TRANSFER	1,003,832,040,277.00	1,016,541,067,145.00	101.27%	1,124,887,222,117.50
8	Transfer Pemerintah Pusat - Dana	927,192,099,579.00	927,905,872,664.00	100.08%	1,014,280,208,517.00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	20,435,328,244.00	18,571,109,574.00	90.88%	19,935,533,625.00
10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Day	5,007,523,893.00	3,585,346,241.00	71.60%	7,466,624,821.00
11	Dana Alokasi Umum	624,804,701,000.00	624,804,701,000.00	100.00%	635,976,768,000.00
12	Dana Alokasi Khusus	276,944,546,442.00	280,944,715,849.00	101.44%	350,901,282,071.00
13	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	49,462,571,000.00	49,462,570,600.00	-	72,021,764,000.00
14	Dana Penyesuaian	49,462,571,000.00	49,462,570,600.00	-	72,021,764,000.00
15	Transfer Pemerintah Provinsi	27,177,369,698.00	39,172,623,881.00	144.14%	38,585,249,600.50
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27,177,369,698.00	39,172,623,881.00	144.14%	38,585,249,600.50
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12,850,785,828.00	13,284,767,133.00	103.38%	10,284,623,813.00
18	Pendapatan Hibah	6,572,558,628.00	7,006,539,933.00	106.60%	0.00
19	Pendapatan Lainnya	6,278,227,200.00	6,278,227,200.00	100.00%	10,284,623,813.00
20	BELANJA	1,124,046,655,068.00	1,036,295,614,517.00	92.19%	1,100,826,089,914.30
21	BELANJA OPERASI	814,777,463,971.00	737,141,333,932.00	90.47%	751,587,986,240.30
22	Belanja Pegawai	511,384,313,363.00	457,510,843,584.00	89.47%	560,845,511,903.30
23	Belanja Barang	244,374,377,981.00	223,864,244,139.00	91.61%	165,577,099,020.00
24	Belanja subnidi	4,211,424,000.00	3,790,368,000.00	90.00%	1,052,856,000.00
25	Belanja Hibah	54,807,348,627.00	51,975,878,209.00	94.83%	24,112,519,317.00
26	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
27	BELANJA MODAL	307,289,625,861.00	299,133,618,885.00	97.35%	348,422,789,544.00
28	Belanja Tanah	31,000,000.00	0.00	0.00%	3,236,753,280.00
29	Belanja Peralatan dan Mesin	53,049,707,132.00	48,382,467,793.00	91.20%	61,383,138,588.00
30	Belanja Bangunan dan Gedung	52,756,899,367.00	50,903,833,360.00	96.49%	47,630,254,250.00
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	194,424,960,362.00	193,458,787,940.00	99.50%	230,231,074,156.00
32	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,448,150,000.00	2,448,150,000.00	100.00%	803,486,050.00
33	Belanja Modal BLUD	3,000,000,000.00	2,457,050,342.00	81.90%	5,138,083,220.00
34	Belanja Modal Dana BOS	1,578,909,000.00	1,483,329,450.00	93.95%	0.00
35	BELANJA TAK TERDUGA	1,979,565,236.00	20,661,700.00	1.04%	815,314,130.00
36	Belanja Tak Terduga	1,979,565,236.00	20,661,700.00	1.04%	815,314,130.00
37	TRANSFER	110,834,670,536.00	110,834,670,136.00	100.00%	99,586,385,172.00
38	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	1,916,133,440.00	1,916,133,440.00	100.00%	0.00
39	Bagi Hasil Pajak	1,173,800,000.00	1,173,800,000.00	100.00%	0.00
40	Bagi Hasil Retribusi	742,333,440.00	742,333,440.00	100.00%	0.00
41	TRANSFER/BATUAN KEUANGAN	108,918,537,096.00	108,918,536,696.00	100.00%	99,586,385,172.00
42	Bantuan Keuangan ke Desa	108,373,417,224.00	108,373,416,824.00	100.00%	99,041,265,300.00
43	Bantuan Keuangan Lainnya	545,119,872.00	545,119,872.00	100.00%	545,119,872.00
44	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1,234,881,325,694.00	1,147,130,284,653.00	92.89%	1,200,412,475,086.30
45	SURPLUS / (DEFISIT)	(102,889,328,756.00)	8,588,097,646.00	-8.35%	25,882,897,346.44
46	PEMBIAYAAN				
47	PENERIMAAN DAERAH	110,190,519,756.00	110,191,980,882.82	100.00%	89,307,622,411.38
48	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	110,190,519,756.00	110,191,980,882.82	100.00%	89,242,395,078.38
49	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00		65,227,333.00
50	PENGELUARAN DAERAH	7,301,191,000.00	7,000,000,000.00	95.87%	5,000,000,000.00
51	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	100.00%	5,000,000,000.00
52	Pembayaran Pokok Utang	301,191,000.00	0.00	0.00%	0.00
53	PEMBIAYAAN NETTO	102,889,328,756.00	103,191,980,882.82	100.29%	84,307,622,411.38
54	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	111,780,078,528.82	-	110,190,519,757.82

Watansoppeng, 20 Agustus 2018

BUPATI SOPPENG



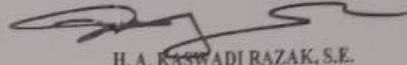
**PEMERINTAH KABUPATEN SOOPENG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

No	Uraian	(dalam rupiah)	
		2017	2016
1	PENDAPATAN		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
1.1	Pendapatan Pajak Daerah		
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	14,754,345,470.28	12,228,566,391.34
1.1.2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,432,610,535.00	7,083,915,686.00
1.1.3	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	15,056,096,674.38	13,050,651,239.00
1.1.4	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	37,243,052,680.00	32,363,133,316.34
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	137,429,416,676.87	134,344,308,772.18
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	18,571,109,574.00	20,057,254,625.00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3,585,346,241.00	7,466,624,821.00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	624,804,701,000.00	635,976,768,000.00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	280,944,715,849.00	350,901,282,071.00
1.2.1.5	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	927,905,872,664.00	1,014,401,929,517.00
1.2.1.6	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		
1.2.1.6.1	Dana Operasi Khusus	0.00	0.00
1.2.1.6.2	Dana Penyesuaian	7,500,000,000.00	39,104,805,000.00
1.2.1.6.3	Jumlah Pendapatan Transfer-Lainnya	7,500,000,000.00	39,104,805,000.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Provinsi		
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37,769,251,852.00	35,367,550,821.50
1.2.2.2	Pendapatan Eksternal Hasil Lainnya	0.00	0.00
1.2.2.3	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	37,769,251,852.00	35,367,550,821.50
1.2.3	Jumlah Pendapatan Transfer	973,175,124,516.00	1,088,874,285,338.50
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
1.3.1	Pendapatan Hibah	25,623,851,851.00	3,971,356,675.00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	7,764,961,588.00	10,284,623,813.00
1.3.3	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	33,388,813,439.00	14,255,980,488.00
1.4	JUMLAH PENDAPATAN	1,143,993,354,631.87	1,237,474,574,598.68
2	BEBAN		
2.1	Beban Pegawai	469,652,683,838.00	560,445,306,205.30
2.2	Beban Persediaan	97,875,623,086.45	81,651,042,711.02
2.3	Beban Jasa	95,838,497,852.25	99,984,089,703.83
2.4	Beban Pemeliharaan	15,956,112,709.84	13,130,237,992.98
2.5	Beban Perjalanan Dinas	27,054,016,242.00	26,006,491,017.00
2.6	Beban Subsidi	3,790,368,000.00	1,052,856,000.00
2.7	Beban Hibah	11,510,886,250.00	7,567,043,513.00
2.8	Beban Penyusutan	140,644,616,045.87	162,939,005,603.81
2.9	Beban Transfer	68,963,236,378.20	66,669,426,172.00
2.10	Beban Lain-lain	13,735,305,117.44	11,718,586,755.00
2.11	Beban Penyisihan	3,957,327,182.53	381,870,086.21
2.12	JUMLAH BEBAN	948,978,672,702.58	1,031,545,955,760.15
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	195,014,681,929.29	205,928,618,838.53
4	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
4.1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	368,012,000.00	0.00
4.2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
4.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00
4.5	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2,168,590,995.65)	(358,252,977.70)
4.6	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1,800,578,995.65)	(358,252,977.70)
5	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	193,214,202,933.64	205,570,365,860.83

Uraian	2017	2016
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	193,214,102,933.64	205,570,365,860.83

Watansoppeng, 20 Agustus 2018

BUPATI SOPPENG



H. A. KASWADI RAZAK, S.E.

2019-7-4 13:01



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2017	2016
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Penerimaan Pajak Daerah	14,730,111,288.00	11,945,173,586.00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	8,148,916,936.00	8,137,906,236.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	15,056,096,674.38	13,050,651,239.00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87,667,182,966.62	58,040,240,056.24
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	22,156,426,205.00	27,402,158,446.00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	29,610.00	0.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	624,894,701,000.00	635,976,768,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	280,944,715,849.00	350,901,282,071.00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	49,462,570,600.00	72,021,764,000.00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	39,172,623,881.00	38,585,249,600.50
13	Penerimaan Hibah	7,006,539,933.00	0.00
14	Penerimaan Lainnya	6,278,227,200.00	10,284,623,813.00
15	Jumlah Arus Kas Masuk	1,155,428,142,143.00	1,226,345,817,047.74
16	Arus Kas Keluar		
17	Pembayaran Pegawai	457,510,843,584.00	537,069,577,120.30
18	Pembayaran Barang	223,864,244,139.00	189,353,033,803.00
19	Pembayaran Subsidi	3,790,368,000.00	1,052,856,000.00
20	Pembayaran Hibah	51,975,878,209.00	24,112,519,317.00
21	Pembayaran Bantuan keuangan	108,918,536,696.00	99,586,385,172.00
22	Pembayaran Tak Terduga	20,661,700.00	815,314,130.00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1,173,800,000.00	0.00
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	742,333,440.00	0.00
25	Jumlah Arus Kas Keluar	847,996,665,768.00	851,989,685,542.30
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	307,431,476,375.00	374,356,131,505.44
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
28	Arus Kas Masuk		
29	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	370,312,000.00	0.00
31	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
32	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
33	Penjualan atas Aset Lainnya	0.00	0.00
34	Jumlah Arus Kas Masuk	370,312,000.00	0.00
35	Arus Kas Keluar		
36	Perolehan Tanah	0.00	3,236,753,280.00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin	52,322,847,585.00	66,521,221,808.00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan	50,903,833,360.00	47,630,254,250.00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	193,458,787,940.00	230,231,074,156.00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2,448,150,000.00	803,486,050.00
41	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7,000,000,000.00	5,000,000,000.00
43	Jumlah Arus Kas Keluar	306,133,618,885.00	353,422,789,544.00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(305,763,306,885.00)	(353,422,789,544.00)
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
46	Arus Kas Masuk		
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	65,227,333.00
48	Jumlah Arus Kas Masuk	0.00	65,227,333.00
49	Arus Kas Keluar		
50	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00
51	Jumlah Arus Kas Keluar	0.00	0.00

NO	URAIAN	2017		2016	
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0.00		65,227,333.00
53	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
54	Arus Kas Masuk				
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		88,896,566,746.00		92,866,063,800.00
56	Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu				0.00
57	Jumlah Arus Kas Masuk		88,896,566,746.00		92,866,063,800.00
58	Arus Kas Keluar				
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		88,615,148,406.00		92,866,063,800.00
60	Pengeluaran UP Tahun Berkenaan Yang Belum Disetor		4,903,107.00		0.00
61	Pengeluaran Pengembalian Kas Dana BOS Sekolah Swasta		3,628,892.00		0.00
62	Jumlah Arus Kas Keluar		88,623,680,405.00		92,866,063,800.00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		272,886,341.00		0.00
64	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		1,941,055,831.00		20,998,569,294.44
65	Saldo Awal Kas dan Setara Kas di BUD		105,501,343,769.82		84,381,623,750.38
66	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		660,000.00		0.00
67	Saldo Awal Kas di BLUD		1,704,763,206.00		2,944,286,242.00
68	Saldo Awal Kas di FKTP		2,983,752,782.00		1,916,485,086.00
69	Saldo Awal Kas di Dana BOS		9,993,124.00		0.00
70	Saldo Akhir Kas di BUD		112,141,568,712.82		110,240,964,372.82
71	Saldo Akhir Kas di Dana BOS		0.00		9,993,124.00
72	Saldo Akhir Kas		112,141,568,712.82		110,250,957,496.82

Watansoppeng, 20 Agustus 2018
BUPATI SOPPENG


H. A. KASWADI RAZAK, S.E.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

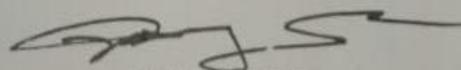


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	2017	2016
Ekuitas Awal	1,889,239,917,271.35	1,394,767,116,417.74
Surplus/defisit LO	193,214,102,933.64	205,570,365,860.83
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi nilai persediaan	0.00	0.00
Selisih revaluasi aset tetap	0.00	306,709,832,135.00
Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap	4,876,028,184.00	(17,858,883,895.35)
Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang	(82,734,353.00)	(1,795,753,408.52)
Kenaikan/Penurunan Nilai Utang	(874,199,569.75)	(72,792,437.00)
Kenaikan/Penurunan Nilai Persediaan	(24,868,492.00)	551,283,014.16
Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Lainnya	(133,116,000.00)	(1,526,021,251.81)
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
Kenaikan/Penurunan Nilai Kas	(8,531,999.00)	(81,848,340.00)
Kenaikan/Penurunan Nilai Investasi	13,322,134.00	34,840,381.00
Koreksi atas akumulasi penyusutan Aset Tetap	(6,727,907,577.08)	5,066,409,143.95
Koreksi atas akumulasi penyusutan Aset Lainnya	(501,896,443.80)	(3,885,885,537.89)
Koreksi atas Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	(55,690,000.00)
Koreksi atas penyisihan piutang pajak	0.00	1,712,666,911.00
Koreksi atas penyisihan piutang retribusi	229,500.00	0.00
Koreksi atas penyisihan piutang BLUD	16,100.00	(14,633,959.60)
Koreksi atas penyisihan piutang transfer	43,353,986.77	118,912,237.84
Ekuitas Akhir	2,079,033,715,675.13	1,889,239,917,271.35

Watansoppeng, 20 Agustus 2018
 BUPATI SOPPENG


 H. A. KASWADI RAZAK, S.E.

2019-7-4 13:02



3. NEKAWA
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2017	2016
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	99,835,883,474.82	97,001,343,769.82
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	116,496,691.00	660,000.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	80,071,844.00	10,377,000.00
6	Kas di BLUD	513,463,161.00	1,744,830,821.00
7	Kas di FKTP	1,930,205,628.00	2,983,752,782.00
8	Kas Dana Bos	1,165,447,912.00	9,993,124.00
9	Kas dan setara Kas	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
10	Piutang Pajak Daerah	2,365,926,671.00	2,352,580,418.00
11	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(613,065,682.55)	(438,473,913.31)
12	Piutang Pajak Daerah Netto	1,752,860,988.45	1,914,106,504.69
13	Piutang Retribusi Daerah	709,256,999.00	618,951,800.00
14	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(440,160,465.00)	(343,320,679.00)
15	Piutang Retribusi Daerah Netto	269,096,534.00	275,631,121.00
16	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	23,484,135,225.98	11,636,538,843.00
17	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(450,535,883.64)	(4,500.00)
18	Penyisihan Piutang Lainnya	(11,600,000.00)	(12,921,100.00)
19	Penyisihan Piutang BLUD	(1,773,532,702.90)	(62,464,473.89)
20	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto	21,248,466,639.44	11,561,148,769.11
21	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	7,267,425,325.00	8,670,797,354.00
22	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(36,337,126.63)	(43,353,986.77)
23	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	7,231,088,198.37	8,627,443,367.23
24	Belanja Dibayar Muka	210,207,251.26	132,829,860.34
25	Piutang Lainnya	1,486,734,388.00	-
26	Penyisihan Piutang Lainnya	(1,486,734,388.00)	-
27	Piutang Lainnya Netto	0,00	-
28	Persediaan	17,677,950,209.00	11,728,540,575.27
29	Jumlah Aset Lancar	160,531,238,533.34	144,490,657,694.46
30	INVESTASI JANGKA PANJANG		
31	Investasi Non Permanen		
32	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
33	Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
34	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00
35	Investasi Permanen		
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24,064,139,262.63	21,283,774,247.63
37	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
38	Jumlah Investasi Permanen	24,064,139,262.63	21,283,774,247.63
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang	24,064,139,262.63	21,283,774,247.63
40	ASET TETAP		
41	Tanah	549,503,340,153.21	549,503,340,153.21
42	Peralatan dan Mesin	344,642,770,278.49	295,450,997,055.74
43	Gedung dan Bangunan	682,807,983,029.00	638,821,788,969.24
44	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,161,381,120,849.96	886,097,407,849.96
45	Aset Tetap Lainnya	11,250,188,450.60	11,554,913,750.60
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20,916,134,663.40	104,256,572,588.40
47	Akumulasi Penyusutan	(884,462,893,080.44)	(743,121,994,742.81)
48	Jumlah Aset Tetap	1,886,038,644,344.22	1,742,563,025,624.34
49	ASET LAINNYA		
50	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	10,833,382,000.00	10,833,382,000.00
51	Aset Tak Berwujud	7,175,817,179.00	6,291,126,679.00
52	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5,318,514,679.00)	(4,522,151,679.00)
53	Aset Tak Berwujud Netto	1,857,302,500.00	1,768,975,000.00
54	Aset Lain-lain	22,756,399,542.60	21,483,938,244.60
55	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(10,911,961,440.37)	(10,344,820,314.47)
56	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	96,371,937.00	96,371,937.00
57	Jumlah Aset Lainnya	24,631,494,539.23	23,837,846,867.13
58	JUMLAH ASET	2,095,265,516,679.41	1,932,175,304,433.56

No.	URAIAN	2017	2016
59	KEWAJIBAN		
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
62	Pendapatan Diterima Dimuka	281,418,340.00	0.00
63	Utang Belanja	108,802,137.08	88,663,375.96
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	4,207,231,869.00	35,732,649,812.25
65	Utang BLUD	1,070,146,231.20	555,886,657.00
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16,231,801,004.28	42,935,387,162.21
67	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
68	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
69	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
70	Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
71	Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
72	Utang Dalam Negeri-Obligasi	0.00	0.00
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
75	JUMLAH KEWAJIBAN	16,231,801,004.28	42,935,387,162.21
76	EKUITAS		
77	EKUITAS		
78	Ekuitas	2,079,033,715,675.13	1,889,239,917,271.35
79	Jumlah Ekuitas	2,079,033,715,675.13	1,889,239,917,271.35
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,095,265,516,679.41	1,932,175,304,433.56

Watansoppeng, 20 Agustus 2018

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, S.E.

2019-7-4 13:03

BIOGRAFI PENULIS



Heriani, lahir di Tae pada tanggal 12 Agustus 1996 dari pasangan Bapak Nurdin dan Ibu Hartati. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jalan Marewangeng, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sul-Sel.

Pendidikan yang di tempuh oleh peneliti yaitu RA Paomallimpoe lulus pada tahun 2002, SDN 176 Dabbere lulus tahun 2008, SMPN 3 Liliraja lulus tahun 2011, SMAN 2 Watansoppeng lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai pada sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).